



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RICHARD ARNALDO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 486711

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.510.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 556 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 3805 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 904 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 16151 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/392 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 283.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 225.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 7.574.617.076**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	397.919.304
Sub Total	Rp.	11.990.536.380
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.990.536.380

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.